

**PERANCANGAN SISTEM HASIL *MONITORING* DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS *DASHBOARD*
DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

LAPORAN KERJA PRAKTEK



Oleh :

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NIM | : 220030045 |
| NAMA | : IDA AYU ADHIRA SATYA PHARA |
| JENJANG STUDI | : STRATA SATU (S1) |
| PROGRAM STUDI | : SISTEM INFORMASI |

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2025**

**PERANCANGAN SISTEM HASIL *MONITORING* DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BERBASIS *DASHBOARD* DI KOMISI INFORMASI PROVINSI
BALI**

LAPORAN KERJA PRAKTEK



Oleh :

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NIM | : 220030045 |
| NAMA | : IDA AYU ADHIRA SATYA PHARA |
| JENJANG STUDI | : STRATA SATU (S1) |
| PROGRAM STUDI | : SISTEM INFORMASI |

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2025**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK

N I M : 220030045
N a m a : Ida Ayu Adhira Satya Phara
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Kerja Praktek : Perancangan Sistem Hasil *Monitoring* Dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Berbasis *Dashboard* Di
Komisi Informasi Provinsi Bali

Disetujui Oleh:

Tanggal.....
Pembina

Tanggal.....
Pembimbing

(I Gede Pariasa, S.S., M.Hum.)

(Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom.)

Tanggal

Ketua Program Studi

(Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T.)

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan tugas Kerja Praktek di Komisi Informasi Bali selama tiga bulan, terhitung sejak Agustus hingga November.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini terdapat berbagai kendala dan tantangan. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB STIKOM Bali.
2. Bapak Dr. Roy Rudolf Husein, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor I; Ibu Ni Luh Putri Srinadi, S.E., M.M.Kom. selaku Wakil Rektor II; dan Bapak Yudi Agusta, Ph.D. selaku Wakil Rektor III ITB STIKOM Bali atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
3. Ibu Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Informatika dan Komputer sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan serta penyusunan laporan ini.
4. Bapak Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali.
5. Seluruh Komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Bali atas kesempatan, bimbingan, dan bantuannya selama kegiatan kerja praktek.
6. Orang tua yang selalu mendukung segala aktivitas dan senantiasa mendoakan yang terbaik.
7. Teman-teman serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan kerja praktek ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Denpasar,

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK..... | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Kerja Praktek..... | 2 |
| 1.4 Manfaat Kerja Praktek..... | 2 |
| 1.5 Ruang Lingkup Kerja Praktek..... | 3 |
| 1.6 Metode Kerja Praktek..... | 3 |
| 1.6.1 Lokasi Kerja Praktek..... | 4 |
| 1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek | 4 |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data | 4 |
| BAB II TINJAUAN UMUM INSTANSI..... | 7 |
| 2.1 Sejarah Komisi Informasi Provinsi Bali | 7 |
| 2.2 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali..... | 7 |
| 2.2.1 Visi | 8 |
| 2.2.2 Misi..... | 8 |
| 2.3 Struktur dan Fungsi Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali..... | 8 |
| 2.3.1 Struktur Organisasi..... | 9 |
| 2.3.2 Fungsi Organisasi..... | 10 |
| 2.4 Tugas Komisi Informasi Provinsi Bali..... | 10 |
| BAB III LANDASAN TEORI | 11 |
| 3.1 <i>Dashboard</i> | 11 |
| 3.2 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi | 11 |
| 3.3 Visualisasi Data..... | 11 |
| 3.4 <i>Flowchart</i> | 12 |
| 3.5 <i>Use Case Diagram</i> | 14 |
| 3.6 Teknologi Pendukung Perancangan <i>Dashboard</i> | 15 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 17 |
| 4.1 Identifikasi Permasalahan Publikasi Hasil Monev | 17 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 4.2 | Analisis Kebutuhan Sistem <i>Dashboard</i> | 18 |
| 4.3 | Perancangan <i>Dashboard</i> Visualisasi | 19 |
| 4.4 | Desain <i>Dashboard</i> | 21 |
| 4.4.1 | <i>Header Dashboard</i> | 22 |
| 4.4.2 | Ringkasan <i>Summary Indicators</i> | 22 |
| 4.4.3 | Grafik Peringkat Kabupaten Terbaik | 23 |
| 4.4.4 | Diagram Distribusi Kualifikasi..... | 24 |
| 4.4.5 | Tabel Daftar Hasil Penilaian | 24 |
| 4.4.6 | Desain Panel Navigasi dan Filter Data..... | 25 |
| 4.4.7 | Skema Warna dan Tata Letak | 26 |
| 4.5 | Pembahasan | 27 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 29 |
| 5.1 | Kesimpulan | 29 |
| 5.2 | Saran | 29 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 31 |



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 3. 1. Simbol-simbol <i>Flowchart</i> dan Fungsinya | 12 |
| Table 3. 2. Elemen-elemen <i>Use Case Diagram</i> | 14 |



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1. Google Maps Lokasi Komisi Informasi Provinsi Bali | 4 |
| Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali | 9 |
| Gambar 4. 1. <i>Use Case Diagram</i> Sistem <i>Dashboard</i> Hasil Monev | 19 |
| Gambar 4. 2. Diagram Alur Pengolahan Data Monev ke <i>Dashboard</i> | 21 |
| Gambar 4. 3. Tampilan <i>Header Dashboard</i> Hasil Monev Badan Publik Provinsi Bali | 22 |
| Gambar 4. 4. Tampilan <i>Summary Card</i> Total Badan Publik dan Rata-Rata Nilai Monev..... | 23 |
| Gambar 4. 5. Tampilan Grafik Peringkat Kabupaten/Kota Terbaik Berdasarkan Nilai Rata-Rata Monev..... | 23 |
| Gambar 4. 6. Tampilan Diagram Distribusi Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik | 24 |
| Gambar 4. 7. Tampilan Tabel Daftar Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik | 25 |
| Gambar 4. 8. Tampilan Panel Navigasi dan Fitur Filter <i>Dashboard</i> Hasil Monev | 26 |
| Gambar 4. 9. Tampilan Keseluruhan <i>Dashboard</i> Hasil Monev Badan Publik Provinsi Bali..... | 26 |

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan berbagai badan publik yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pemerintah yang baik hanya dapat tercapai apabila masyarakatnya memiliki akses informasi yang memadai dan mudah diakses. Di Indonesia sendiri, kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, sementara badan publik berkewajiban untuk menyediakan, mengumumkan, dan melaporkan informasi secara rutin.

Di tingkat daerah, Komisi Informasi Provinsi Bali berperan dalam memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi terhadap berbagai badan publik, mulai dari instansi provinsi, kabupaten/kota, hingga lembaga lainnya. Hasil Monev menjadi salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasinya. Selain itu, hasil tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh wilayah Bali.

Saat ini, hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Bali masih disajikan dalam bentuk dokumen Surat Keputusan (SK Monev) yang diunggah di website resminya. Walaupun data tersebut sudah dapat diakses publik, namun cara penyajiannya masih sederhana dan tidak *user-friendly*. Masyarakat maupun badan publik harus membuka dokumen satu per satu untuk melihat hasil penilaian. Hal ini tentu menyulitkan aksesibilitas terutama jika ingin membandingkan hasil antar tahun atau antar badan publik di tahun tertentu. Akibatnya, informasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan mudah menjadi kurang optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kini ada cara untuk memperbaiki penyajian data tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan membuat *dashboard* interaktif yang dapat menampilkan hasil Monev dalam bentuk

visual seperti grafik, diagram, *summary card*, dan tabel yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Pemanfaatan *dashboard* ini akan memudahkan pengguna untuk melihat hasil penilaian berdasarkan kategori badan publik atau tahun pelaksanaan dengan lebih cepat dan mudah.

Melalui perancangan sistem *dashboard* ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi hasil Monev dengan lebih praktis dan menarik. Selain itu, *dashboard* ini juga dapat menjadi alat bantu bagi badan publik untuk mengevaluasi kualitas keterbukaan informasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang *dashboard* interaktif yang dapat menyajikan hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Bali secara informatif dan mudah diakses oleh badan publik serta masyarakat, dengan tambahan fitur pencarian, filter, dan perbandingan untuk menampilkan data secara jelas.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang *dashboard* interaktif yang dapat menampilkan data hasil *Monitoring* dan Evaluasi Komisi Informasi Bali dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Melalui *dashboard* ini, masyarakat dan badan publik diharapkan dapat menelusuri serta memahami data keterbukaan informasi dengan cara yang lebih praktis.

1.4 Manfaat Kerja Praktek

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek (KP) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Informasi Bali:

Hasil kerja praktek ini dapat menjadi rancangan awal sistem *dashboard* yang siap dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev).

2. Bagi Kampus (ITB Stikom Bali):

Laporan ini menjadi bukti penerapan ilmu yang telah dipelajari mahasiswa di perkuliahan, serta menambah koleksi penelitian terapan yang

bermanfaat bagi pengembangan kurikulum dan kualitas pembelajaran di bidang sistem informasi.

3. Bagi Mahasiswa:

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan keterampilan dalam menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi berbasis teknologi informasi, serta mengasah kemampuan visualisasi data dan desain antarmuka pengguna sebagai bekal untuk pengalaman kerja di masa depan.

1.5. Ruang Lingkup Kerja Praktek

Adapun Ruang Lingkup dari kerja praktek ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

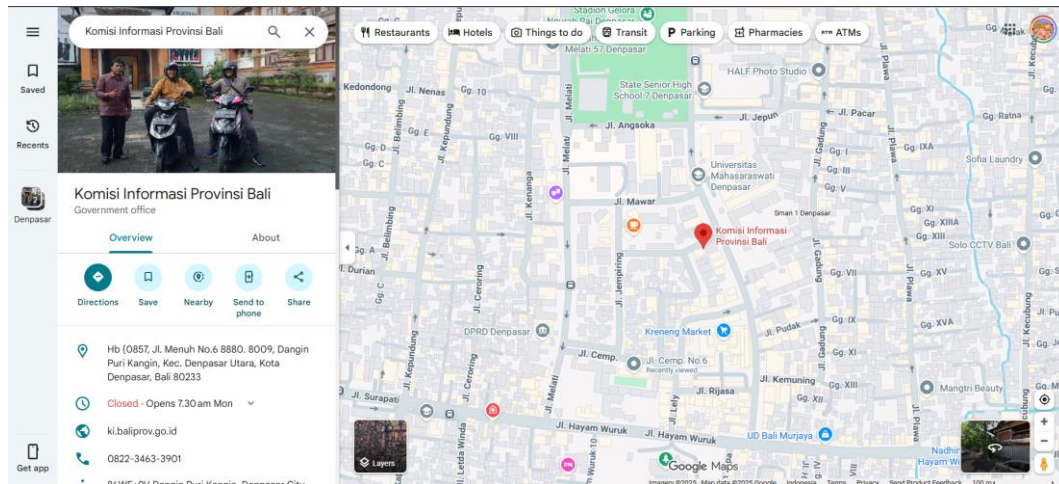
1. Perancangan sistem *dashboard* interaktif yang berfungsi untuk menampilkan data hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Bali. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi hasil Monev yang telah tersedia.
2. Analisis kebutuhan sistem yang meliputi identifikasi pengguna utama *dashboard* serta jenis informasi yang perlu disajikan agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.
3. Perancangan antarmuka dan visualisasi data difokuskan pada pembuatan tampilan *dashboard* yang menarik, meliputi pembuatan *mockup* dan pemilihan jenis grafik atau diagram yang sesuai untuk menampilkan hasil penilaian Monev berdasarkan kategori badan publik dan tahun pelaksanaan.
4. Pengguna sistem dalam perancangan ini terdiri dari dua kelompok utama:
 - a. Admin: bertanggung jawab mengelola serta memperbarui data hasil Monev setiap tahun.
 - b. Masyarakat dan Badan Publik: berperan sebagai pengguna yang mengakses informasi hasil Monev untuk tujuan transparansi, evaluasi kinerja, serta peningkatan pelayanan informasi publik.

1.6 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan kerja praktek ini, metode kerja praktek yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

1.6.1 Lokasi Kerja Praktek

Kegiatan Kerja Praktek dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Bali, yang bertugas mengawasi dan memastikan penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi. Komisi ini beralamat di Jalan Menuh No. 6, Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.



Gambar 1. 1. Google Maps Lokasi Komisi Informasi Provinsi Bali

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Studi Sistem Informasi, dengan durasi selama tiga bulan (90 hari). Rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Periode : 14 Agustus 2025 – 14 November 2025
2. Tempat : Komisi Informasi Provinsi Bali
3. Alamat : Jalan Menuh No. 6, Kelurahan Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
4. Waktu :
 - Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WITA
 - Jumat : 08.00 – 13.30 WITA

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan data hasil Monev di Komisi Informasi Provinsi Bali. Dari kegiatan ini, penulis dapat memahami bagaimana proses pengumpulan

dan penilaian data hasil Movev, serta apa saja jenis informasi yang dikumpulkan dari setiap badan publik.

2. Wawancara

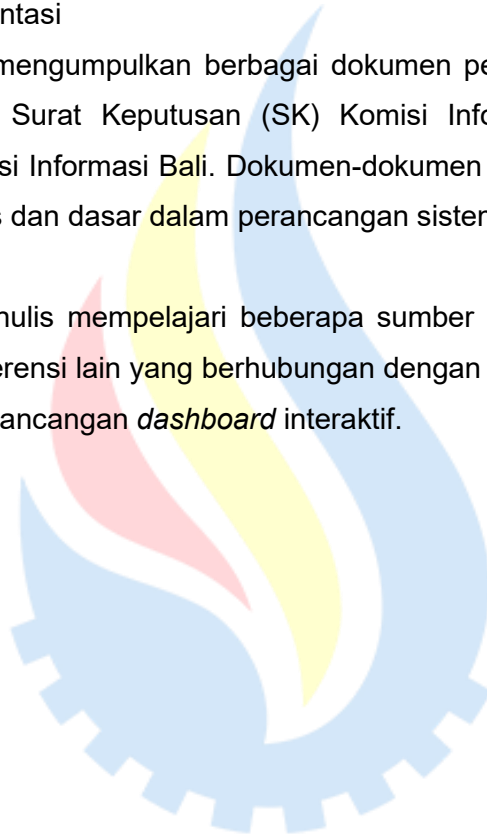
Penulis melakukan sesi tanya jawab singkat kepada staf yang mengelola hasil Monev untuk mendapatkan informasi lebih tentang cara data dipublikasikan serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada sistem *dashboard* yang akan dibuat.

3. Studi Dokumentasi

Penulis juga mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti data hasil Monev, Surat Keputusan (SK) Komisi Informasi, serta laporan tahunan Komisi Informasi Bali. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai bahan analisis dan dasar dalam perancangan sistem.

4. Studi Pustaka

Selain itu, penulis mempelajari beberapa sumber literatur seperti jurnal, buku, dan referensi lain yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik dan perancangan *dashboard* interaktif.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB II

TINJAUAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Komisi Informasi Provinsi Bali

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) melahirkan sebuah lembaga baru bernama Komisi Informasi. Lembaga ini bersifat non-struktural dan dibentuk untuk menjalankan amanat undang-undang dengan baik, yaitu dengan mengawasi dan bertindak sebagai "pengadil" untuk memastikan semua instansi pemerintah dan badan publik lainnya terbuka dalam menyediakan informasi.

Di Bali, pembentukan Komisi Informasi diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan agar setiap provinsi membentuk Komisi Informasi paling lambat dua tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) resmi dibentuk melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012–2016, yang ditetapkan di Denpasar pada 30 April 2012. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa masa berlaku dimulai sejak tanggal pelantikan.

Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Bali untuk periode pertama (2012–2016) dilaksanakan pada 4 Juni 2012 di Kantor Gubernur Bali, Gedung Wiswa Sabha Utama. Sejak saat itu tanggal 4 Juni selalu diperingati sebagai hari ulang tahun Komisi Informasi Provinsi Bali, yang juga menandai awal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Bali. Setelah berdiri pada 2012, Komisi Informasi Bali terus menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan UU KIP di daerah Bali, baik dengan sasaran badan publik maupun kepada masyarakat secara keseluruhan.

Sejak pelantikan pertama pada 4 Juni 2012 hingga tahun 2022, Komisi Informasi Bali telah genap berusia satu dekade. Kini, pada tahun 2025, lembaga ini telah memasuki usia ke-13 dan terus berkomitmen untuk mendorong badan publik di Bali agar konsisten melaksanakan keterbukaan informasi secara menyeluruh.

2.2 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali

Berikut ini adalah visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Bali:

2.2.1 Visi

Adapun visi yang diusung oleh Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai panduan dalam pelaksanaan tugasnya adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”. Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2.2.2 Misi

Adapun misi Komisi Informasi Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

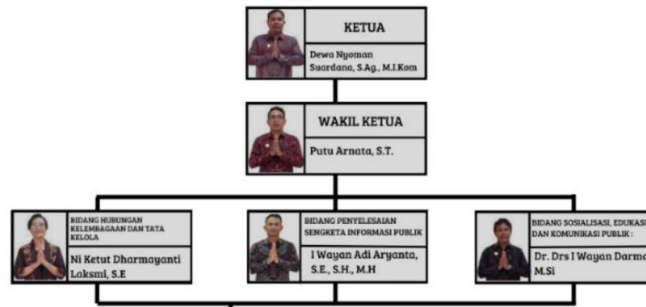
1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

2.3 Struktur dan Fungsi Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali

Berikut ini adalah struktur dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Bali:

2.3.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali

Struktur organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, serta beberapa Komisioner yang membidangi Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Sosialisasi serta Edukasi Publik. Setiap posisi memiliki peran penting yang saling mendukung untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berjalan efektif di wilayah Bali.

1. Ketua (Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom)

Ketua memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali. Ketua juga berperan dalam mengoordinasikan tata kelola kelembagaan, memimpin Rapat Pleno, serta menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi Provinsi dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

2. Wakil Ketua (Putu Arnata, S.T.)

Wakil Ketua membantu Ketua dalam menjalankan tugas kepemimpinan serta menggantikan peran Ketua apabila berhalangan. Wakil Ketua juga turut menjalankan tugas yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arahan serta kebijakan lembaga.

3. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, S.E.)

Bidang ini memiliki tugas membangun hubungan kerja sama antara Komisi Informasi dengan berbagai lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H.)

Bidang ini memiliki tugas mengoordinasikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan masyarakat kepada Komisi Informasi.

5. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (Dr. Drs. I Wayan Dharma, M.Si.)

Bidang ini memiliki tugas dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

2.3.2 Fungsi Organisasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2.4 Tugas Komisi Informasi Provinsi Bali

Berikut ini adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Dashboard

Dashboard adalah tampilan antarmuka pada komputer yang banyak menampilkan bagan, grafik, laporan, indikator visual, dan mekanisme alert, yang akan dikonsolidasi ke dalam platform informasi yang dinamis dan relevan [1]. Tampilan visual pada *dashboard* harus menyajikan dan merancang informasi dengan sebaik dan sejelas mungkin sehingga penggunaannya mendapatkan inti informasi secara benar [2]. Informasi yang disajikan biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber data sehingga menghasilkan tampilan yang menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Dalam konteks Komisi Informasi Provinsi Bali, *dashboard* digunakan untuk menampilkan hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik.

3.2 Monitoring dan Evaluasi

Menurut Musriyadi Nabiu dan Ketut Sukiyono [3], *Monitoring* atau Pemantauan didefinisikan sebagai aktivitas internal dari suatu program manajemen yang ditujukan untuk menentukan apakah progres dari suatu proyek telah diimplementasikan sesuai dengan rencana, sedangkan Evaluasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas internal atau eksternal manajemen untuk menilai kepatutan dari rancangan program dan metode implementasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, menilai hasil yang diinginkan maupun tidak dari suatu program, serta menilai faktor yang mempengaruhi tingkat dan distribusi manfaat yang dihasilkan. Secara umum, kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.3 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah proses menyampaikan informasi kuantitatif dan kualitatif secara efektif melalui tampilan visual untuk memudahkan pemahaman data dan mendukung proses pengambilan keputusan [4]. Visualisasi data memungkinkan pengguna untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak mengenai data mentah yang didapatkan dari berbagai sumber. Visualisasi dapat dilakukan dengan menggunakan *dashboard*, di mana teks, pola, dan korelasi yang



tidak terdeteksi dapat dengan mudah divisualisasikan dengan menggunakan perangkat lunak visualisasi [5]. Dalam perancangan *dashboard* hasil Monev, visualisasi data digunakan untuk menampilkan hasil penilaian keterbukaan informasi dari berbagai badan publik dalam bentuk grafik batang, diagram lingkaran, *summary card* atau table interaktif. Jenis-jenis visualisasi data yang umum digunakan yaitu:


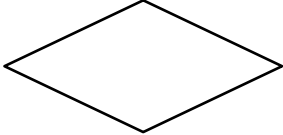
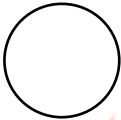
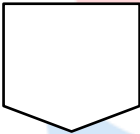




1. Diagram Batang (*Bar Chart*): digunakan untuk membandingkan data antar kategori secara jelas.
2. Diagram Garis (*Line Chart*): menampilkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu.
3. Diagram Lingkaran (*Pie Chart*): menunjukkan proporsi atau persentase dari suatu keseluruhan.
4. Tabel Interaktif (*Interactive Table*): menyajikan data secara rinci dan dapat disaring atau diurutkan sesuai kebutuhan.

3.4 Flowchart

Flowchart merupakan gambaran berbentuk suatu grafik yang disertai langkah-langkah dan urutan suatu prosedur dari suatu program [6]. Biasanya, *flowchart* digunakan untuk menjelaskan logika program, prosedur kerja, maupun aliran data dalam sistem informasi secara runtut dan mudah dipahami [7]. Tujuan utama penggunaan *flowchart* yaitu untuk mempermudah proses analisis serta komunikasi antara perancang sistem, pengembang, dan pengguna. Beragam simbol digunakan dalam *flowchart* untuk merepresentasikan jenis proses tertentu, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 3. 1. Simbol-simbol *Flowchart* dan Fungsinya

| No | Simbol | Nama | Fungsi |
|----|---|----------------|---|
| 1 |  | Terminal | Menunjukkan titik awal atau akhir dari suatu program. |
| 2 |  | Input / Output | Menandakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> data tanpa bergantung pada jenis perangkat yang digunakan. |


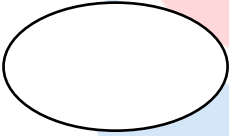



| | | | |
|----|---|--------------------|--|
| 3 |  | Process | Menyatakan suatu tindakan (proses) yang dilakukan oleh komputer. |
| 4 |  | Decision | Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban: ya / tidak. |
| 5 |  | Connector | Menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. |
| 6 |  | Offline Connector | Menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. |
| 7 |  | Punched Card | Menyatakan <i>input</i> berhasil dari kartu atau <i>output</i> ke kartu. |
| 8 |  | Document | Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen (melalui printer). |
| 9 |  | Display | Menyatakan peralatan <i>output</i> yang digunakan. |
| 10 |  | Predefined Process | Menyatakan pelaksanaan suatu bagian (<i>sub-program</i>) atau prodesur. |

| | | | |
|----|---|------|--|
| 11 |  | Flow | Menyatakan jalannya arus suatu proses. |
|----|---|------|--|

3.5 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat [8]. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam *use case diagram* yaitu:

Table 3. 2. Elemen-elemen *Use Case Diagram*

| No | Simbol | Nama | Fungsi |
|----|---|----------------|--|
| 1 |  | Actor | Menggambarkan pengguna atau sistem yang berinteraksi dengan <i>use case</i> . |
| 2 |  | Use case | Merepresentasikan fungsi atau fitur yang disediakan oleh sistem. |
| 3 |  | System | Menunjukkan batas sistem, yaitu fungsi mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang tidak. |
| 4 |  | Association | Menunjukkan hubungan antara aktor dengan <i>use case</i> . |
| 5 |  | Generalization | Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i> . |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------|--|
| 6 | -----<< Include >>--> | <<include>> | Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya. |
| 7 | -----<< Extend >>--> | <<extend>> | Menunjukkan bahwa <i>use case</i> merupakan tambahan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. |

3.6 Teknologi Pendukung Perancangan *Dashboard*

Dalam perancangan *dashboard* hasil Monev Komisi Informasi Provinsi Bali, digunakan beberapa teknologi pendukung, yaitu Google Sheets dan Power BI.

1. Google Sheets

Google Sheet adalah aplikasi dari Google yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, mengedit, dan membagikan lembar kerja berbentuk tabel. Dalam perancangan sistem ini, Google Sheets digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data hasil Monev. Data yang semula berbentuk dokumen PDF (SK Monev) dikonversi ke dalam format spreadsheet agar lebih mudah diolah dan dihubungkan dengan *dashboard*. Penggunaan Google Sheets pada tahap ini bersifat sementara, yaitu sebagai sarana perancangan dan simulasi sebelum sistem dikembangkan secara penuh.

2. Power BI

Power BI adalah alat *business intelligence* dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah data secara mendetail dan menyajikannya dalam visualisasi real-time. Penyajian data dalam bentuk visual yang baik membuat informasi lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Visualisasi yang disediakan Power BI dapat berupa grafik, chart, dan lainnya [1]. Alat ini juga memungkinkan integrasi langsung dengan Google Sheets, sehingga setiap perubahan data otomatis diperbarui di tampilan *dashboard*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Permasalahan Publikasi Hasil Monev

Proses publikasi hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali saat ini masih dilakukan secara manual. Setiap tahunnya hasil penilaian terhadap badan publik disusun dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Monev, yang kemudian difoto menjadi file PDF dan diunggah ke situs resmi Komisi Informasi Bali sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Meskipun langkah ini sudah mencerminkan upaya transparansi, cara penyajian data tersebut masih bersifat statis dan kurang interaktif. Format dokumen PDF tidak memungkinkan pengguna untuk menelusuri data dengan mudah. Baik masyarakat maupun badan publik harus membuka setiap file SK secara terpisah untuk melihat nilai, kualifikasi, atau peringkat badan publik dari tahun ke tahun yang tentu akan memakan waktu dan menghambat kemudahan akses.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa kendala dalam penyebaran dan pemanfaatan data hasil Monev. Beberapa di antaranya yaitu:

1. Hasil Monev dalam bentuk SK PDF hanya menampilkan rekapitulasi penilaian badan publik tanpa fitur pencarian atau filter, sehingga sulit menemukan data tertentu secara cepat.
2. Setiap tahunnya hasil Monev disajikan dalam dokumen terpisah dan belum terhubung dengan data dari periode sebelumnya.
3. Format PDF hasil *scan* terkadang sulit untuk dibaca dan tidak memungkinkan pengguna melakukan pencarian teks secara langsung.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa meskipun Komisi Informasi Bali telah melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi, namun cara penyajiannya masih belum mendukung prinsip kemudahan akses dan keterbacaan data publik secara optimal.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sebuah *dashboard* interaktif berbasis data digital yang mampu mengubah format publikasi hasil Monev menjadi lebih informatif, terhubung antar tahun, dan mudah digunakan oleh siapa pun. Hasil evaluasi keterbukaan informasi nantinya akan ditampilkan secara visual dalam bentuk grafik, *summary card*, tabel interaktif, fitur filter berdasarkan tahun atau

kategori badan publik, serta tambahan fitur pencarian untuk nama badan publik. Dengan begitu, penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat maupun badan publik.

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem *Dashboard*

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memahami bagaimana proses publikasi hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik berjalan saat ini, serta apa saja hal yang perlu diperbaiki agar informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan menarik. Proses analisis ini dilakukan melalui observasi langsung pada situs resmi Komisi Informasi Provinsi Bali dan tanya jawab singkat dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data Monev. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh gambaran mengenai kebutuhan utama yang menjadi dasar dalam merancang sistem *dashboard* publikasi hasil Monev.

1. Aktor Sistem

- a. Admin Komisi Informasi: mengelola dan memperbarui data hasil Monev setiap tahun.
- b. Pengguna Publik (Masyarakat dan Badan Publik): mengakses *dashboard* untuk melihat hasil Monev.

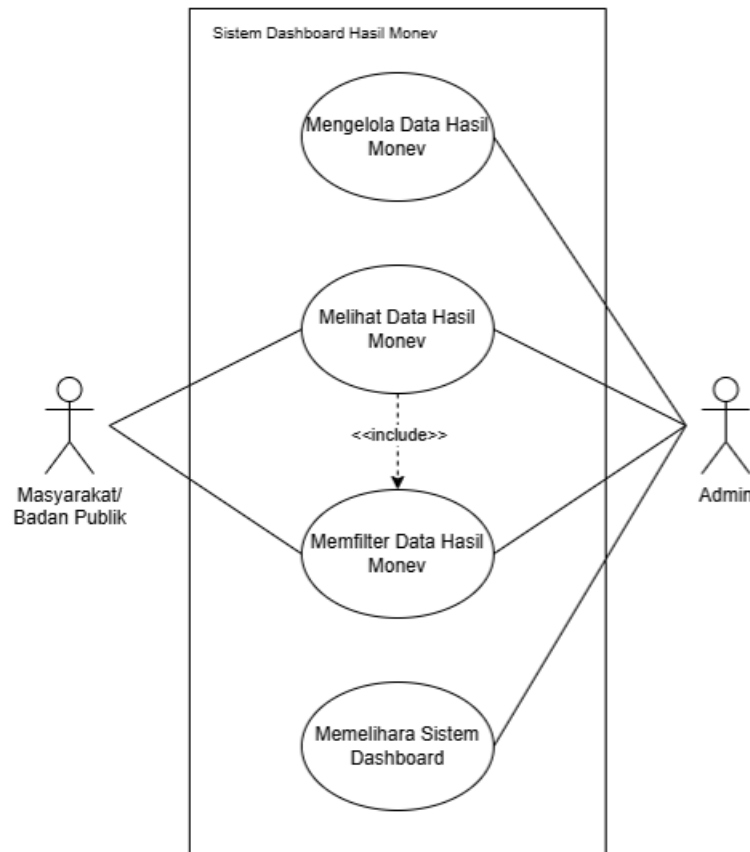
2. Fitur Fungsional

- a. Visualisasi data hasil Monev dalam bentuk *summary card*, grafik batang, diagram lingkaran, dan tabel interaktif.
- b. Filter berdasarkan tahun dan kategori badan publik.
- c. Fitur pencarian (*search bar*) untuk menemukan nama badan publik.
- d. Indikator statistik total badan publik yang dinilai dan rata-rata nilai Monev keseluruhan.
- e. Peringkat kabupaten/kota terbaik dan distribusi tingkat keterbukaan (informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, tidak informatif, dan tidak dapat dinilai).
- f. Tabel daftar hasil penilaian badan publik yang berisi nama badan publik, nilai, kualifikasi, dan keterangan hasil penilaian yang dapat diurutkan.

3. Fitur Non-Fungsional

- a. *Dashboard* dapat diakses publik tanpa *login* melalui browser desktop maupun perangkat seluler.

- b. Antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan menarik secara visual untuk memudahkan masyarakat dan badan publik dalam membaca data.
- c. Sistem terhubung langsung ke spreadsheet sebagai sumber visualisasi.



Gambar 4. 1. Use Case Diagram Sistem Dashboard Hasil Monev

4.3 Perancangan Dashboard Visualisasi

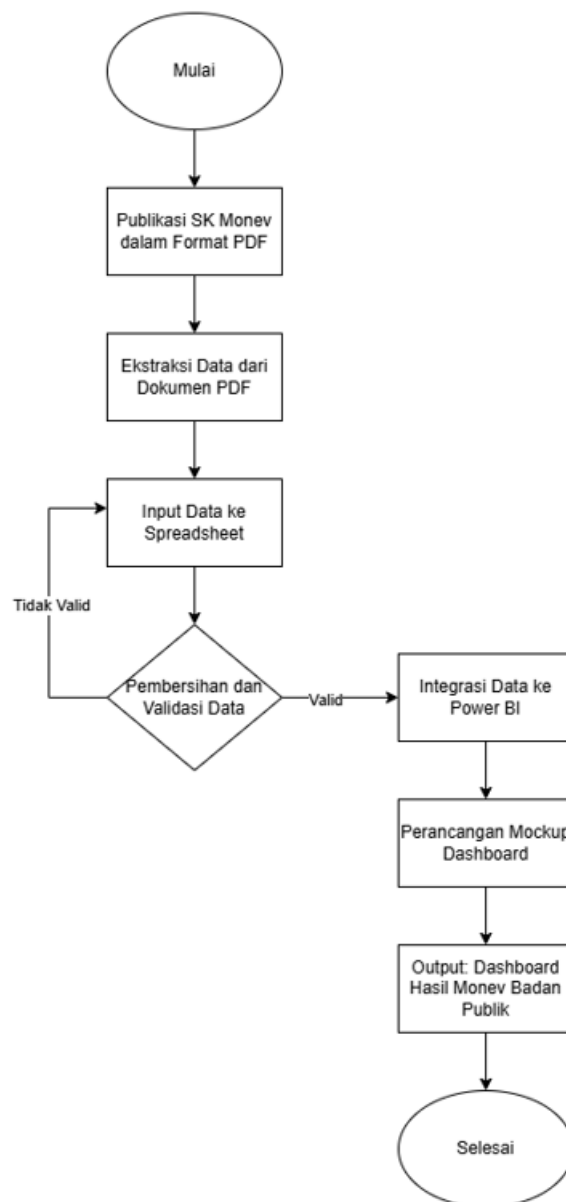
Perancangan *dashboard* visualisasi ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan hasil *Monitoring* dan *Evaluasi* (Monev) keterbukaan informasi publik secara lebih menarik dan mudah untuk diakses oleh siapa pun. Data yang sebelumnya hanya dalam bentuk dokumen dapat diubah menjadi tampilan visual yang menarik melalui *dashboard*. Dalam prosesnya, konsep desain yang digunakan berfokus pada kemudahan penggunaan (*user friendly*) agar masyarakat umum maupun badan publik dapat dengan mudah menemukan informasi yang dicari tanpa kesulitan.

Sebelum mulai merancang tampilan *dashboard*, seluruh data hasil Monev yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk dokumen SK (PDF) dikumpulkan dan diekstrak ke format CSV menggunakan Google Sheets. Langkah ini dilakukan agar data yang awalnya hanya bisa dibaca manual bisa diolah secara otomatis. Dalam spreadsheet tersebut, disusun berbagai informasi penting seperti kategori nama badan publik, nilai hasil Monev, kategori kualifikasi, kabupaten badan publik, keterangan, dan tahun pelaksanaan.

Setelah semua data dibersihkan dan tersusun dengan rapi, Google Sheets dihubungkan ke Power BI untuk membuat tampilan visualnya. Dari situ, mulai dibuat berbagai elemen utama *dashboard* seperti *summary card* untuk menampilkan jumlah total badan publik serta rata-rata nilai Monev secara keseluruhan, grafik batang (*bar chart*) untuk menampilkan peringkat kabupaten/kota terbaik, diagram lingkaran (*doughnut chart*) untuk distribusi kualifikasi keterbukaan informasi, serta tabel interaktif yang berisi daftar badan publik beserta nilai, kategori kualifikasi, dan keterangannya. Selain itu, ditambahkan juga fitur pencarian untuk nama badan publik serta fitur filter tahun dan kategori untuk memudahkan pengguna menemukan dan menampilkan data sesuai kebutuhan.

Walaupun *dashboard* ini belum terhubung langsung dengan sistem basis data otomatis, penggunaan Google Sheets sebagai sumber data sudah cukup membantu karena admin bisa memperbarui data dengan mudah tanpa harus membuat ulang visualisasi. Cukup mengganti isi data di spreadsheet, maka tampilan *dashboard* akan ikut berubah secara otomatis.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses kerja sistem, dibuat juga diagram alur sederhana yang menjelaskan tahapan mulai dari pengumpulan data dari dokumen SK, penginputan ke spreadsheet, hingga penyajian visual akhir di *dashboard* Power BI yang dapat diakses oleh publik.



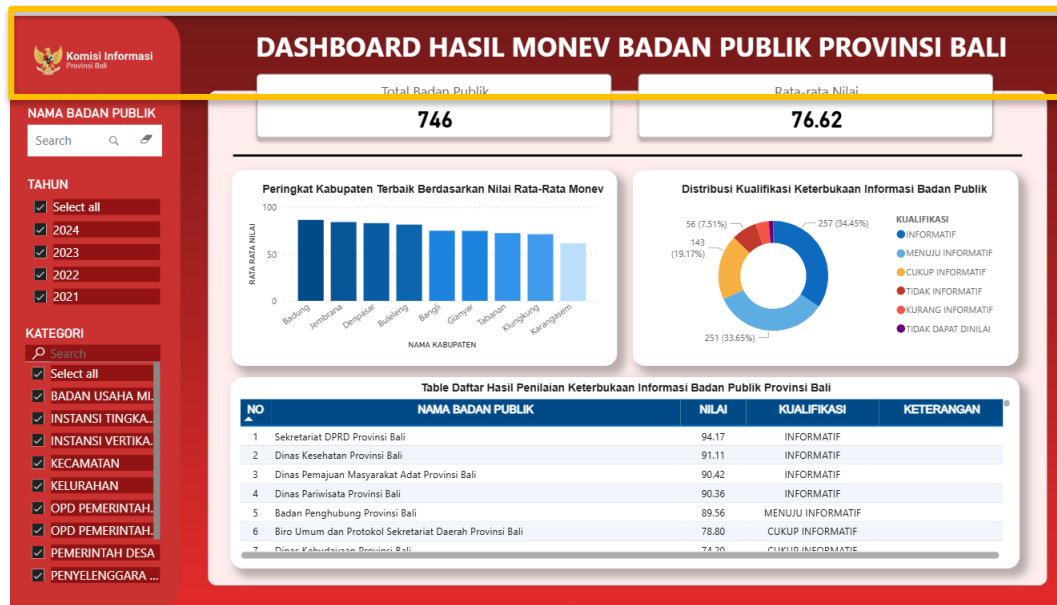
Gambar 4. 2. Diagram Alur Pengolahan Data Moneyev ke *Dashboard*

4.4 Desain *Dashboard*

Desain *dashboard* merupakan tahap perancangan visual yang bertujuan untuk mengubah kebutuhan fungsional menjadi bentuk tampilan yang mudah dipahami dan digunakan. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan tata letak, pemilihan elemen visual, serta penataan struktur data agar semua informasi hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Moneyev) keterbukaan informasi publik bisa ditampilkan dengan jelas dan saling terhubung satu sama lain. Berikut penjelasan dari setiap elemen utama yang terdapat dalam tampilan *dashboard*:

4.4.1 Header Dashboard

Bagian paling atas berfungsi sebagai identitas sistem dengan judul “Dashboard Hasil Monev Badan Publik Provinsi Bali”. Elemen ini mempertegas konteks data yang ditampilkan. Pada bagian ini juga menampilkan logo resmi Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai tanda keaslian dan kredibilitas sumber data.



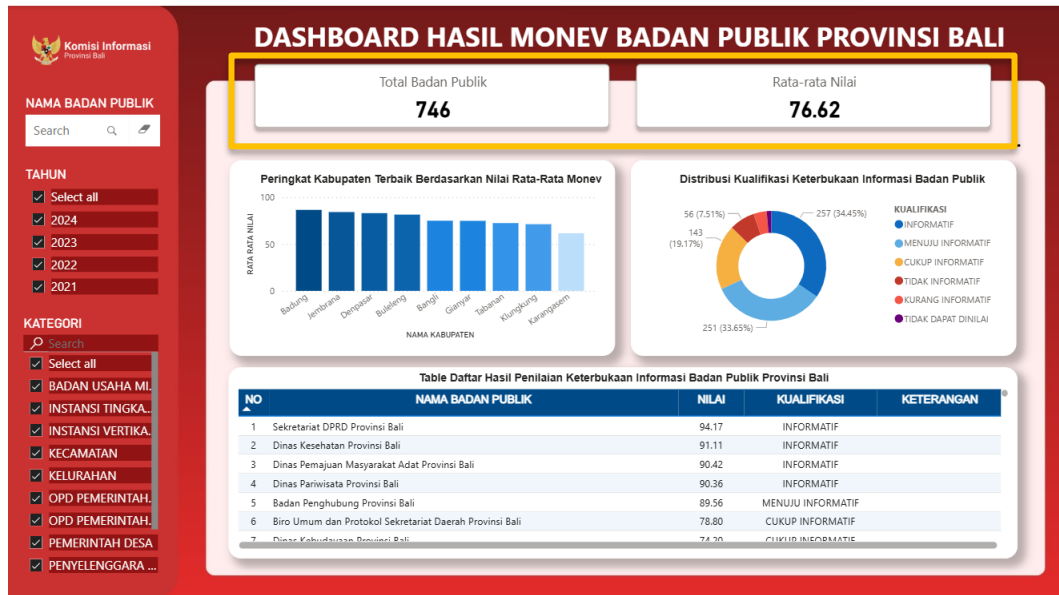
Gambar 4. 3. Tampilan *Header Dashboard* Hasil Monev Badan Publik Provinsi Bali

4.4.2 Ringkasan *Summary Indicators*

Bagian ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Total Badan Publik: menampilkan jumlah keseluruhan instansi yang dinilai dalam kegiatan Monev.
2. Rata-rata Nilai: menunjukkan hasil rata-rata penilaian keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik.

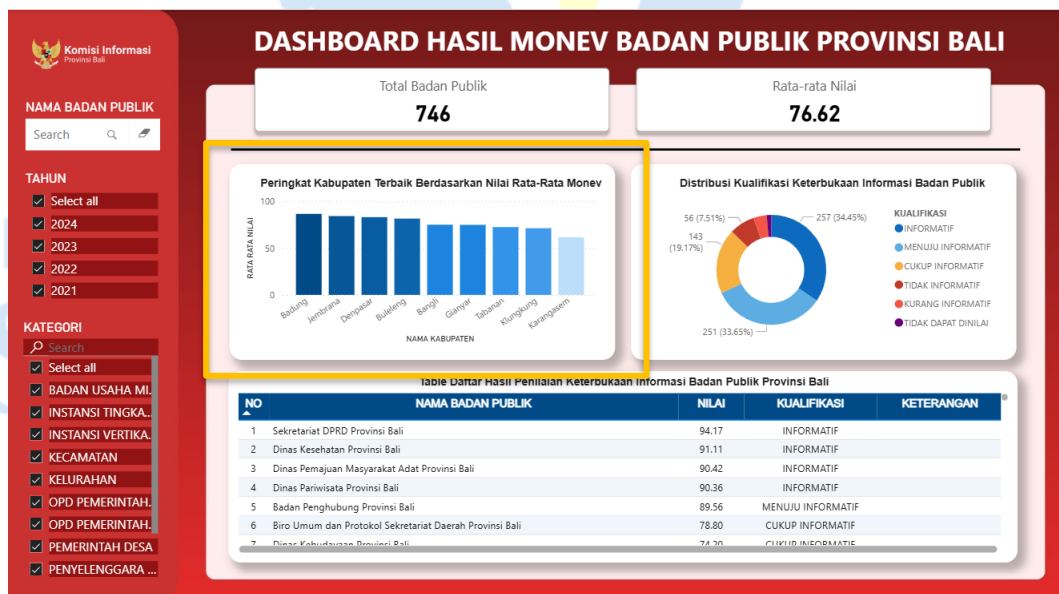
Elemen ini disajikan dalam bentuk *summary cards* berwarna putih agar mudah terlihat dan langsung memberikan gambaran umum kepada pengguna tanpa perlu membaca keseluruhan tabel.



Gambar 4. 4. Tampilan *Summary Card* Total Badan Publik dan Rata-Rata Nilai Monev

4.4.3 Grafik Peringkat Kabupaten Terbaik

Bagian ini menampilkan grafik batang (*bar chart*) untuk memperlihatkan kabupaten atau kota dengan capaian nilai rata-rata Monev tertinggi. Visualisasi ini mempermudah pengguna dalam membandingkan performa antar daerah secara langsung, sehingga mudah mengetahui daerah mana yang memiliki capaian terbaik dan paling konsisten dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.



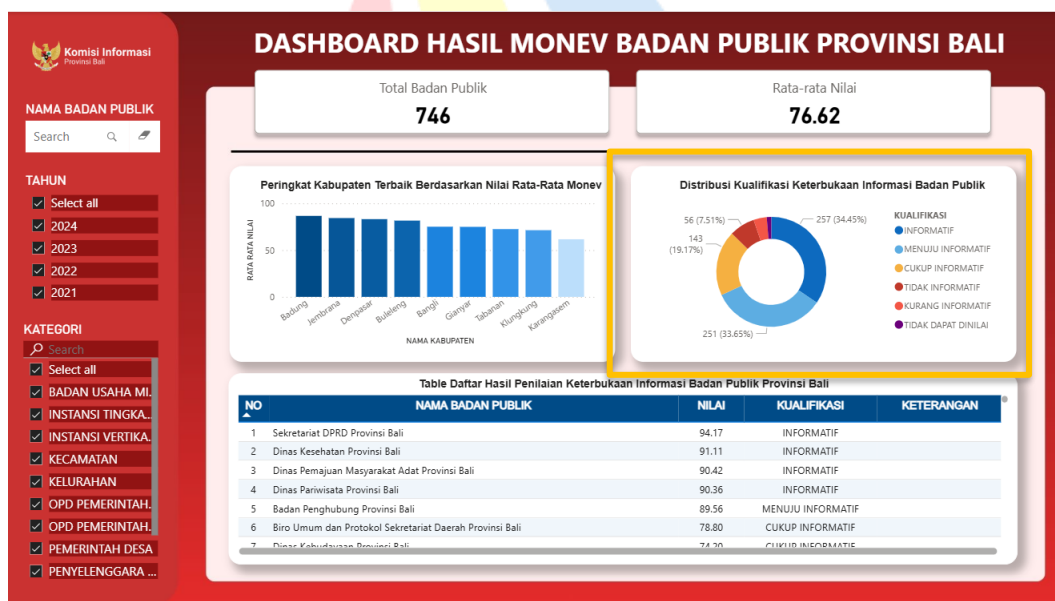
Gambar 4. 5. Tampilan Grafik Peringkat Kabupaten/Kota Terbaik Berdasarkan Nilai Rata-Rata Monev

4.4.4 Diagram Distribusi Kualifikasi

Bagian ini divisualisasikan dengan diagram lingkaran (*doughnut chart*) yang menampilkan proporsi masing-masing kategori kualifikasi keterbukaan informasi publik, seperti:

1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Kurang Informatif
5. Tidak Informatif
6. Tidak Dapat Dinilai

Visualisasi ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat keterbukaan informasi badan publik di Provinsi Bali secara keseluruhan. Setiap kategori ditampilkan dengan warna yang berbeda agar pengguna lebih mudah membedakan masing-masing tingkat kualifikasi.



Gambar 4. 6. Tampilan Diagram Distribusi Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

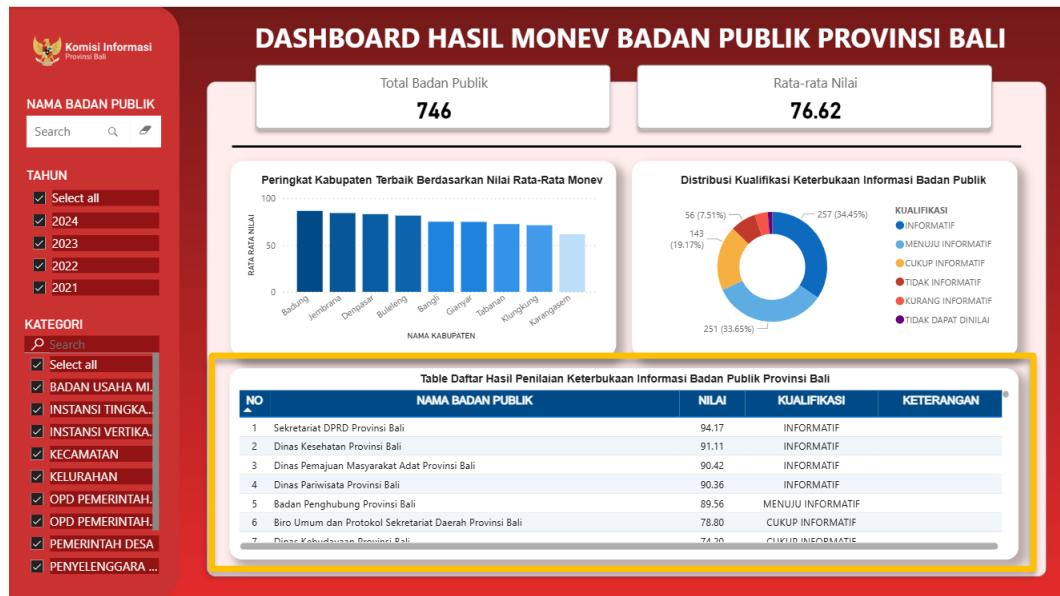
4.4.5 Tabel Daftar Hasil Penilaian

Bagian tabel berfungsi untuk menampilkan data detail dari setiap badan publik yang dinilai. Kolom-kolom yang disajikan meliputi:

1. Nomor urut
2. Nama badan publik
3. Nilai Monev
4. Kategori kualifikasi

5. Keterangan

Tabel ini menjadi bagian paling informatif karena menyajikan rincian hasil penilaian setiap badan publik secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami capaian dan tingkat keterbukaan informasi masing-masing badan publik.



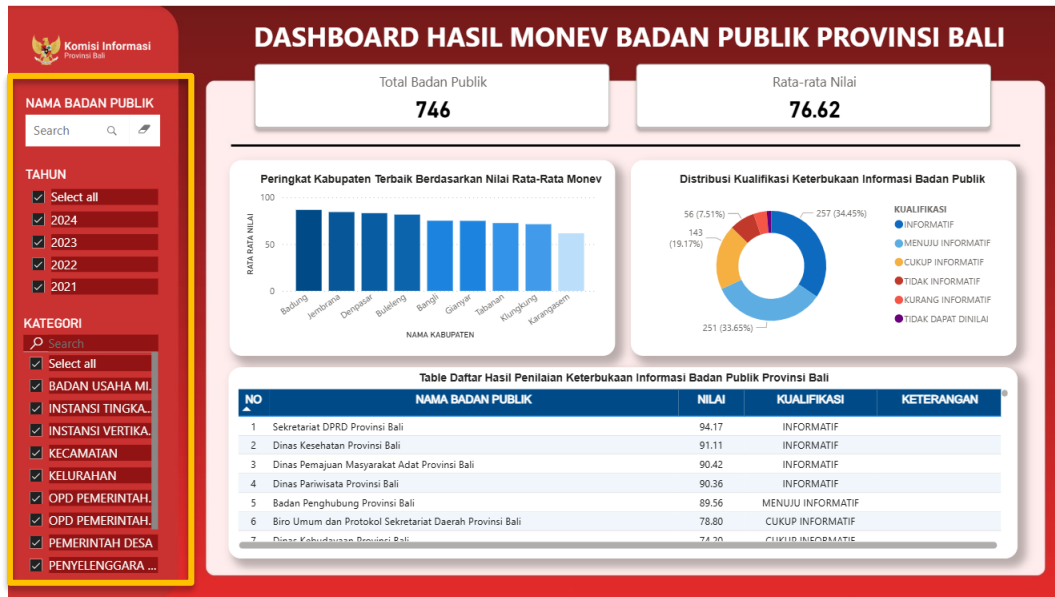
Gambar 4. 7. Tampilan Tabel Daftar Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik

4.4.6 Desain Panel Navigasi dan Filter Data

Bagian sisi kiri *dashboard* digunakan sebagai panel navigasi, yang berfungsi untuk menelusuri dan menyaring data hasil Monev. Pada bagian ini tersedia tiga fitur utama, yaitu:

1. Filter Tahun Pelaksanaan Monev (2021–2024): memungkinkan pengguna memilih periode tahun tertentu untuk melihat hasil evaluasi.
2. Filter Kategori Badan Publik: memungkinkan pengguna menampilkan data berdasarkan jenis kategori.
3. Fitur Pencarian Nama Badan Publik: memungkinkan pengguna menemukan badan publik tertentu.

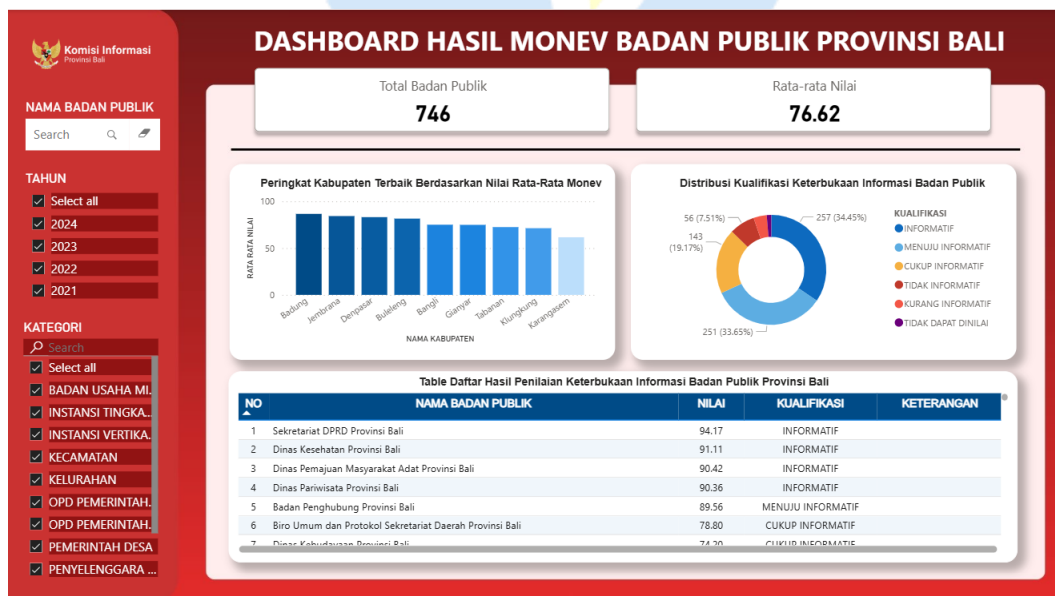
Fitur pencarian dan filter ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi data dan menyesuaikan tampilan *dashboard* sesuai kebutuhan tanpa harus membuka dokumen secara terpisah.



Gambar 4. 8. Tampilan Panel Navigasi dan Fitur Filter *Dashboard* Hasil Moneyv

4.4.7 Skema Warna dan Tata Letak

Desain *dashboard* menggunakan warna dasar merah khas Komisi Informasi sebagai identitas visual utama. Warna putih dan biru digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan kesan tampilan profesional dan nyaman dilihat. Tata letaknya dibuat rapi dan seimbang dengan ringkasan indikator di bagian atas, panel navigasi di sisi kiri, grafik visual di tengah, serta tabel penilaian ditempatkan di bagian bawah.



Gambar 4. 9. Tampilan Keseluruhan *Dashboard* Hasil Moneyv Badan Publik Provinsi Bali

4.5 Pembahasan

Dashboard visualisasi hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang dikembangkan ini mampu menyajikan data dalam bentuk visual yang lebih informatif, menarik, dan mudah dipahami baik oleh masyarakat umum maupun pihak internal Komisi Informasi. Berdasarkan hasil implementasi awal, sistem ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Beberapa keunggulan yang dihasilkan dari perancangan *dashboard* ini antara lain:

1. Mempercepat pemahaman data karena hasil Monev yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk dokumen PDF kini dapat dilihat secara visual melalui *summary card*, grafik, diagram, dan tabel.
2. Memudahkan analisis perbandingan antarperiode dengan adanya fitur filter tahun dan kategori yang membantu pengguna melihat tren keterbukaan informasi publik dari waktu ke waktu.
3. Menyediakan fitur pencarian nama badan publik yang memudahkan pengguna menemukan informasi tertentu.
4. Menyajikan data secara terintegrasi dalam satu *platform* sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum dan detail tanpa harus membuka banyak dokumen.

Meskipun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Data yang digunakan masih bersifat statis dan diperbarui secara manual melalui spreadsheet, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk sinkronisasi setiap kali hasil baru diterbitkan.
2. Belum terdapat sistem otomatisasi pembaruan data, misalnya melalui integrasi langsung dengan database atau API resmi.

Ke depannya, *dashboard* ini dapat dikembangkan menjadi sistem publikasi data dinamis yang terhubung langsung dengan sumber data utama yang digunakan oleh Komisi Informasi. Penambahan fungsi lainnya seperti analisis tren, notifikasi pembaruan, dan sinkronisasi otomatis dapat menjadikan *dashboard* ini sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi publik secara lebih cepat dan akurat untuk mendorong keterbukaan dan pembuatan kebijakan berbasis data secara real-time.

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek dan perancangan *dashboard* interaktif hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Dashboard* berhasil menampilkan data hasil Monev dalam bentuk visual yang lebih jelas dan mudah dipahami dibandingkan dokumen PDF sebelumnya.
2. Tampilan sudah terintegrasi dengan berbagai elemen seperti *summary card*, grafik batang, diagram lingkaran, dan tabel interaktif yang dilengkapi fitur filter dan pencarian.
3. Sistem membantu mempercepat penyampaian informasi publik serta memudahkan analisis perbandingan antar tahun dan antar kategori badan publik.
4. Proses pembaruan data masih dilakukan secara manual melalui spreadsheet karena belum terhubung langsung dengan sistem basis data otomatis.

5.2 Saran

Agar *dashboard* ini dapat dikembangkan lebih baik di masa mendatang, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:

1. Menghubungkan sistem langsung ke database atau API resmi agar pembaruan data bisa dilakukan secara otomatis.
2. Menambahkan fitur analisis tren dan perbandingan antar variabel supaya hasil Monev bisa dikaji lebih mendalam.
3. Menyesuaikan tampilan agar responsif di semua perangkat, termasuk ponsel dan tablet.
4. Mengadakan pelatihan bagi admin dan pengguna agar pemanfaatan *dashboard* lebih efektif dan berkelanjutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Maulida, F. Hamidy, and A. D. Wahyudi, "Monitoring aplikasi menggunakan dashboard untuk sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan (Studi kasus: UD Apung)," *Jurnal Tekno Kompak*, vol. 14, no. 1, pp. 47–53, 2020.
- [2] Y. M. MZ and R. L. Lantarsih, "Perancangan dashboard visualisasi efektivitas platform e-commerce untuk pemasaran hasil pertanian petani milenial Kabupaten Sleman," *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, vol. 14, no. 2, pp. 417–424, 2025.
- [3] M. Nabiu and K. Sukiyono, "Metode monitoring dan evaluasi: Diskusi," *Jurnal Agrisepe Universitas Bengkulu*, vol. 2, no. 2, p. 157-163, 2004.
- [4] I. S. D. Jayanti and M. A. Khadija, "Business intelligence dashboard data pengunjung kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 4, pp. 8629–8638, 2024.
- [5] D. A. N. Rizki, *Visualisasi data sentimen terhadap organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jabar Digital Service*, Undergraduate Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- [6] M. Malabay, "Pemanfaatan flowchart untuk kebutuhan deskripsi proses bisnis," *Jurnal Ilmu Komputer*, vol. 12, no. 1, pp. 21–26, 2016.
- [7] S. F. Sihombing, "Perancangan sistem informasi pengelolaan pengunjung berbasis web di Taman Baca Masyarakat Al-Azhari," 2025.
- [8] A. Hendini, "Pemodelan UML sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang (Studi kasus: Distro Zhezha Pontianak)," *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, vol. 4, no. 2, 2016.

